

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, perlu memberikan penghargaan berupa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
5. Bupati adalah Bupati Karo.

6. Perangkat . . .

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP PNS adalah salah satu bentuk penghargaan kepada PNS dan CPNS yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
13. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP PNS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil perkalian antara Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP PNS
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

- (1) Pemberian TPP kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(3) Akuntabel. . .

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS; dan
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud pemberian TPP PNS adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada PNS atas kinerjanya.
- (2) Tujuan pemberian TPP PNS adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja PNS;
 - b. meningkatkan kinerja PNS dan Pemerintah Daerah secara keseluruhan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III
PEMBERIAN TPP PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dikecualikan dari pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- e. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara dan/atau yang mengikuti tugas belajar;
- f. guru dan jabatan fungsional lainnya yang mendapatkan tunjangan Profesi; dan
- g. PNS titipan dari dan ke daerah lain.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian TPP PNS
Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan TPP PNS berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP PNS berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi secara geografis dan daerah terpencil.
- (5) TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (6) TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) Kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c) melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (7) TPP PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Besaran TPP PNS
Paragraf 1
Rumus Perhitungan Jabatan Struktural
Pasal 6

- (1) Besaran tertinggi TPP PNS (Basic TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk jabatan struktural dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Basic TPP PNS = (Nilai Kelas Jabatan) x (Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (2) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$A \text{ TPPBKPK Kab} = ((40\% * B \text{ TPP PNS}) + 60\% * B \text{ TPP PNS})$

Keterangan:

A TPPBKPK Kab = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten

B TPP PNS = Basic TPP PNS

- (3) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dihitung paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dihitung paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dihitung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari Basic TPP.
- (6) Besaran alokasi TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (7) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) mulai dari kelas jabatan tertinggi sampai dengan kelas jabatan terendah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Nilai kelas jabatan untuk menentukan Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengacu pada tunjangan kinerja per kelas jabatan yang berlaku di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

(2) Kelompok. . .

- (2) Kelompok Indeks Kapasitas fiskal daerah untuk menentukan basic TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 9

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di daerah.
- (2) Indeks kemahalan konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (3) Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah untuk menentukan besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi dimana kantor Badan Pemeriksa Keuangan pusat berada yaitu Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 10

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Variabel pengungkit, dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan, dengan bobot 30%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot 25%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah, dengan bobot 10%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah, dengan bobot 3%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, dengan bobot 18%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas, dengan bobot 2%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dengan bobot 2%.
- (3) Komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Indeks Indeks pembangunan manusia, dengan bobot 6%; dan
 - b. Indeks Gini Ratio, dengan bobot 4%.

Paragraf 2

Rumus Perhitungan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Besaran TPP PNS bagi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional diberikan berdasarkan golongan jabatan dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENILAIAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TPP PNS

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja PNS.

(2) Ketentuan. . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan mekanisme pembayaran TPP PNS setiap bulan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP PNS bagi CPNS atau formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP golongan jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional dimana tempat bertugas CPNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini, dibayarkan dihitung tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 5 Mei 2020



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BESARAN TPP PNS JABATAN STRUKTURAL

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
1	Sekretaris Daerah	15	30,196,469
2	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	13	16,475,645
3	Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan	13	16,475,645
4	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Perundang Undangan	13	16,475,645
5	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	14	18,020,000
6	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	12	9,560,000
7	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan	8	5,260,000
8	Kepala Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	5,260,000
9	Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan	8	5,260,000
10	Kepala Bagian Otonomi Daerah	12	9,560,000
11	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Daerah dan Luar Negeri	9	5,260,000
12	Kepala Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD	8	5,260,000
13	Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah	8	5,260,000
14	Kepala Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	12	9,560,000
15	Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Kebijakan Kelembagaan	9	5,260,000
16	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan	9	5,260,000
17	Kepala Sub Bagian Administrasi Kemasyarakatan	8	5,260,000
18	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	12	9,560,000
19	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat	8	5,260,000
20	Kepala Sub Bagian Sosial	8	5,260,000
21	Kepala Sub Bagian Kepemudaan dan Keluarga Berencana	8	5,260,000
22	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	18,020,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
23	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	12	9,560,000
24	Kepala Sub Bagian BUMD dan Tenaga Kerja	8	5,260,000
25	Kepala Sub Bagian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro	8	5,260,000
26	Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan	9	5,260,000
27	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	12	9,560,000
28	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	8	5,260,000
29	Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan	9	5,260,000
30	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan	9	5,260,000
31	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	9,560,000
32	Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	8	5,260,000
33	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Teknologi Informatika Pengadaan Barang dan Jasa	8	5,260,000
34	Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	9	5,260,000
35	Asisten Administrasi Umum	14	18,020,000
36	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	12	9,560,000
37	Kepala Sub Bagian Produk Hukum	9	5,260,000
38	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan	8	5,260,000
39	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	9	5,260,000
40	Kepala Bagian Organisasi	12	9,560,000
41	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	8	5,260,000
42	Kepala Sub Bagian Tatalaksana	8	5,260,000
43	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	9	5,260,000
44	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	12	9,560,000
45	Kepala Sub Bagian Keprotokolan	8	5,260,000
46	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan	9	5,260,000
47	Kepala Sub Bagian Penataan dan Dokumentasi	9	5,260,000
48	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	12	9,560,000
49	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan	9	5,260,000
50	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan	8	5,260,000
51	Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas	8	5,260,000
52	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	8	5,260,000
53	Kepala Bagian Tata Usaha	12	9,560,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
54	Kepala Sub Bagian Agenda dan Ekspedisi	8	5,260,000
55	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	8	5,260,000
56	Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi	8	5,260,000
57	Sekretaris DPRD	14	16,820,000
58	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	11	9,250,000
59	Kepala Sub Bagian Umum	8	5,050,000
60	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	8	5,050,000
61	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	5,050,000
62	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	11	9,250,000
63	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	9	5,050,000
64	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan	8	5,050,000
65	Kepala Sub Bagian Verifikasi	9	5,050,000
66	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	11	9,250,000
67	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan	8	5,050,000
68	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	9	5,050,000
69	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Pengawasan	8	5,050,000
70	Inspektur	14	24,420,000
71	Sekretaris Inspektorat	12	13,000,000
72	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	7,000,000
73	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	7,000,000
74	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	7,000,000
75	Inspektur Pembantu I	11	13,000,000
76	Inspektur Pembantu II	11	13,000,000
77	Inspektur Pembantu III	11	13,000,000
78	Inspektur Pembantu IV	11	13,000,000
79	Kepala Dinas Pendidikan	14	16,370,000
80	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	9,010,000
81	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
82	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	4,920,000
83	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	9	4,920,000
84	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	11	7,960,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
85	Kepala Seksi kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	4,920,000
86	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	4,920,000
87	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	4,920,000
88	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	7,960,000
89	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	9	4,920,000
90	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9	4,920,000
91	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah dasar	9	4,920,000
92	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	7,960,000
93	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	9	4,920,000
94	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	4,920,000
95	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	9	4,920,000
96	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	7,960,000
97	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	9	4,920,000
98	Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	9	4,920,000
99	Kepala Seksi Tugas Pembantuan Pendidik	8	4,920,000
100	Kepala Dinas Kesehatan	14	16,370,000
101	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	9,010,000
102	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
103	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	4,920,000
104	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
105	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	7,960,000
106	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	8	4,920,000
107	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	4,920,000
108	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	9	4,920,000
109	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	7,960,000
110	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	4,920,000
111	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Kesehatan	9	4,920,000
112	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9	4,920,000
113	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	7,960,000
114	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	9	4,920,000
115	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
116	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional	9	4,920,000
117	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	7,960,000
118	Kepala Seksi Kefarmasian	8	4,920,000
119	Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	9	4,920,000
120	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	4,920,000
121	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	14	16,370,000
122	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	9,010,000
123	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
124	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
125	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	11	7,960,000
126	Kepala Seksi Tata Ruang	8	4,920,000
127	Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi	8	4,920,000
128	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	8	4,920,000
129	Kepala Bidang Keciaptakaryaan	11	7,960,000
130	Kepala Seksi Air Minum dan Air Limbah	9	4,920,000
131	Kepala Seksi Persampahan dan Drainase	9	4,920,000
132	Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman	9	4,920,000
133	Kepala Bidang Bina Marga	11	7,960,000
134	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	4,920,000
135	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	4,920,000
136	Kepala Seksi data dan Pelaporan	9	4,920,000
137	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	7,960,000
138	Kepala Seksi Peningkatan dan Pembangunan Sumber Daya Air	9	4,920,000
139	Kepala Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air	9	4,920,000
140	Kepala Seksi data dan Pelaporan	9	4,920,000
141	Kepala Bidang Pertamanan dan Tata Bangunan Gedung	11	7,960,000
142	Kepala Seksi Pertamanan	8	4,920,000
143	Kepala Seksi Penerangan Jalan	8	4,920,000
144	Kepala Seksi Tata Bangunan Gedung	8	4,920,000
145	Kepala UPTD Work Shop	9	3,880,000
146	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	16,370,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
147	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	9,010,000
148	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
149	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
150	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	11	7,960,000
151	Kepala Seksi Perumahan	9	4,920,000
152	Kepala Seksi Permukiman	9	4,920,000
153	Kepala Seksi Bina Teknik Perumahan dan Permukiman	8	4,920,000
154	Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman	11	7,960,000
155	Kepala Seksi Sengketa dan Ganti Kerugian Tanah	9	4,920,000
156	Kepala Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah	9	4,920,000
157	Kepala Seksi Pemakaman	9	4,920,000
158	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	16,370,000
159	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	9,010,000
160	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,920,000
161	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
162	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	4,920,000
163	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	7,960,000
164	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	8	4,920,000
165	Kepala Seksi Ketertiban Umum	8	4,920,000
166	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	8	4,920,000
167	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	11	7,960,000
168	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan	8	4,920,000
169	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	8	4,920,000
170	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	8	4,920,000
171	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pelatihan	11	7,960,000
172	Kepala Seksi Sarana Kebakaran	8	4,920,000
173	Kepala Seksi Prasarana Kebakaran	8	4,920,000
174	Kepala Seksi Pelatihan Penanganan Kebakaran	8	4,920,000
175	Kepala Bidang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan	11	7,960,000
176	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	8	4,920,000
177	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	9	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
178	Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran	8	4,920,000
179	Kepala Dinas Sosial	14	15,610,000
180	Sekretaris Dinas Sosial	12	8,560,000
181	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,630,000
182	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,630,000
183	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	11	7,520,000
184	Kepala Seksi Pelayanan Disabilitas Anak dan Lansia Terlantar	8	4,630,000
185	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Eks Napza dan ODHA	8	4,630,000
186	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	8	4,630,000
187	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11	7,520,000
188	Kepala Seksi Fasilitas Korban Bencana dan Jaminan Sosial	9	4,630,000
189	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan Pekerja Imigran dan Pemulangan Orang Terlantar	8	4,630,000
190	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	8	4,630,000
191	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	11	7,520,000
192	Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan	9	4,630,000
193	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga, Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil	8	4,630,000
194	Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	8	4,630,000
195	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	14	15,510,000
196	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	12	8,500,000
197	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,600,000
198	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,600,000
199	Kepala Bidang Ketenagakerjaan	11	7,470,000
200	Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	8	4,600,000
201	Kepala Seksi Pembinaan Produktivitas dan Perluasan Kesempatan Kerja	8	4,600,000
202	Kepala Seksi Hubungan Industrial, Jamsostek, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9	4,600,000
203	Kepala Bidang Koperasi	11	7,470,000
204	Kepala Seksi Kelembagaan, Kesehatan dan Pengawasan	8	4,600,000
205	Kepala Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Kualitas SDM	8	4,600,000
206	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Koperasi	9	4,600,000
207	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	11	7,470,000
208	Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro	8	4,600,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
209	Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	8	4,600,000
210	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan	8	4,600,000
211	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Negara	8	4,570,000
212	Kepala Urusan Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Negara	8	3,880,000
213	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	15,400,000
214	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	8,440,000
215	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,570,000
216	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,570,000
217	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	11	7,420,000
218	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan	8	4,570,000
219	Kepala Seksi Sumber Daya Pangan	8	4,570,000
220	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	8	4,570,000
221	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	11	7,420,000
222	Kepala Seksi Distribusi Pangan	8	4,570,000
223	Kepala Seksi Harga pangan	8	4,570,000
224	Kepala Seksi Cadangan Pangan	8	4,570,000
225	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	11	7,420,000
226	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	8	4,570,000
227	Kepala Seksi Pengankaragaman Konsumsi Pangan	9	4,570,000
228	Kepala Seksi Keamanan Pangan	8	4,570,000
229	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	16,370,000
230	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	9,010,000
231	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,920,000
232	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
233	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	4,920,000
234	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	11	7,960,000
235	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	8	4,920,000
236	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9	4,920,000
237	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas	8	4,920,000
238	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Pengendalian Pencemaran	11	7,960,000
239	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	8	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
240	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	8	4,920,000
241	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	8	4,920,000
242	Kepala Bidang Kebersihan	11	7,960,000
243	Kepala Seksi Penyapuan dan Pengangkutan	9	4,920,000
244	Kepala Seksi Peralatan	9	4,920,000
245	Kepala Seksi Perbekalan	9	4,920,000
246	Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral	11	7,960,000
247	Kepala Seksi Energi dan Panas Bumi	9	4,920,000
248	Kepala Seksi Hidrogeologi	8	4,920,000
249	Kepala Seksi Sumber Daya Mineral	8	4,920,000
250	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	16,370,000
251	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	9,010,000
252	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
253	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
254	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	4,920,000
255	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	7,960,000
256	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	4,920,000
257	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	9	4,920,000
258	Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk	8	4,920,000
259	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	7,960,000
260	Kepala Seksi Kelahiran	8	4,920,000
261	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	8	4,920,000
262	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	8	4,920,000
263	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Penduduk	11	7,960,000
264	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	4,920,000
265	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	8	4,920,000
266	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komputer	8	4,920,000
267	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	7,960,000
268	Kepala Seksi Kerja sama	8	4,920,000
269	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	8	4,920,000
270	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	8	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
271	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	16,370,000
272	Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	9,010,000
273	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
274	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
275	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
276	Kepala Bidang Penataan Desa	11	7,960,000
277	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa	8	4,920,000
278	Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintahan Desa	9	4,920,000
279	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	8	4,920,000
280	Kepala Bidang Kerjasama Desa	11	7,960,000
281	Kepala Seksi Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa	8	4,920,000
282	Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna	8	4,920,000
283	Kepala Seksi Perdagangan dan Permodalan Ekonomi Desa	8	4,920,000
284	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	11	7,960,000
285	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	8	4,920,000
286	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9	4,920,000
287	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	9	4,920,000
288	Kepala Bidang Kelembagaan	11	7,960,000
289	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	8	4,920,000
290	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	8	4,920,000
291	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat	8	4,920,000
292	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	16,370,000
293	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	9,010,000
294	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
295	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
296	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
297	Kepala Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	11	7,960,000
298	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	8	4,920,000
299	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	8	4,920,000
300	Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial	8	4,920,000
301	Kepala Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak	11	7,960,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
302	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 1	8	4,920,000
303	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 2	8	4,920,000
304	Kepala Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak Bidang 3	8	4,920,000
305	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	11	7,960,000
306	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	8	4,920,000
307	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum	8	4,920,000
308	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial	8	4,920,000
309	Kepala Bidang Pelayanan Perempuan dan Anak	11	7,960,000
310	Kepala Seksi Pelayanan Bagi Perempuan	8	4,920,000
311	Kepala Seksi Pelayanan Bagi Anak	8	4,920,000
312	Kepala Seksi Pengaduan Perempuan dan Anak	8	4,920,000
313	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	15,430,000
314	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	8,460,000
315	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,580,000
316	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,580,000
317	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	11	7,430,000
318	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	4,580,000
319	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana	9	4,580,000
320	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	4,580,000
321	Kepala Bidang Keluarga Berencana	11	7,430,000
322	Kepala Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	8	4,580,000
323	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	9	4,580,000
324	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	7,430,000
325	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga	8	4,580,000
326	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia	9	4,580,000
327	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	8	4,580,000
328	Kepala Dinas Perhubungan	14	16,370,000
329	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	9,010,000
330	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,920,000
331	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
332	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
333	Kepala Bidang Lalu Lintas	11	7,960,000
334	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan	9	4,920,000
335	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	8	4,920,000
336	Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas	9	4,920,000
337	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	11	7,960,000
338	Kepala Seksi Angkutan dalam Trayek	8	4,920,000
339	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	8	4,920,000
340	Kepala Seksi Penguji Sarana	8	4,920,000
341	Kepala Bidang Prasarana	11	7,960,000
342	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana	8	4,920,000
343	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana	8	4,920,000
344	Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana	8	4,920,000
345	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	11	7,960,000
346	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	8	4,920,000
347	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan	8	4,920,000
348	Kepala Seksi Keselamatan	8	4,920,000
349	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	8	4,570,000
350	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	8	3,880,000
351	Kepala UPTD Terminal	8	3,880,000
352	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	15,560,000
353	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	8,530,000
354	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,610,000
355	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,610,000
356	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	7,490,000
357	Kepala Seksi Media Massa dan Elektronik	8	4,610,000
358	Kepala Seksi Media Luar Ruangan	8	4,610,000
359	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	8	4,610,000
360	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	7,490,000
361	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Informatika	9	4,610,000
362	Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Aplikasi	9	4,610,000
363	Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Komunikasi	9	4,610,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
364	Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik	11	7,490,000
365	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi	8	4,610,000
366	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik	9	4,610,000
367	Kepala Seksi Pengelolaan e-Government dan Persandian	8	4,610,000
368	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	16,370,000
369	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	9,010,000
370	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,920,000
371	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
372	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	4,920,000
373	Kepala Bidang Promosi, Deregulasi dan Pengembangan Penanaman Modal	11	7,960,000
374	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	8	4,920,000
375	Kepala Seksi Deregulasi	8	4,920,000
376	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	8	4,920,000
377	Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Standarisasi	11	7,960,000
378	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	8	4,920,000
379	Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan	8	4,920,000
380	Kepala Seksi Standarisasi	8	4,920,000
381	Kepala Bidang Pengolahan Data, Teknologi Informasi	11	7,960,000
382	Kepala Seksi Pengolahan Data	8	4,920,000
383	Kepala Seksi Teknologi Informasi	8	4,920,000
384	Kepala Seksi Dokumentasi	8	4,920,000
385	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu	11	7,960,000
386	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha	8	4,920,000
387	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha	8	4,920,000
388	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Usaha	8	4,920,000
389	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	14	15,670,000
390	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12	8,590,000
391	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,650,000
392	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,650,000
393	Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	11	7,550,000
394	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	9	4,650,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
395	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	9	4,650,000
396	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	8	4,650,000
397	Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga	11	7,550,000
398	Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga	8	4,650,000
399	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus	8	4,650,000
400	Kepala Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	8	4,650,000
401	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	11	7,550,000
402	Kepala Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan	8	4,650,000
403	Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	9	4,650,000
404	Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	9	4,650,000
405	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14	15,610,000
406	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12	8,560,000
407	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,630,000
408	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,630,000
409	Kepala Bidang Layanan dan Pengolahan Perpustakaan	11	7,520,000
410	Kepala Seksi Layanan dan Otomasi	9	4,630,000
411	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan	9	4,630,000
412	Kepala Seksi Konservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan	8	4,630,000
413	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	11	7,520,000
414	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	9	4,630,000
415	Kepala Seksi Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Perpustakaan	9	4,630,000
416	Kepala Seksi Pengembangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca	8	4,630,000
417	Kepala Bidang Kearsipan	11	7,520,000
418	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	9	4,630,000
419	Kepala Seksi Pengembangan Arsip	9	4,630,000
420	Kepala Seksi Dokumentasi Pemeliharaan Arsip	9	4,630,000
421	Kepala Dinas Pertanian	14	16,370,000
422	Sekretaris Dinas Pertanian	12	9,010,000
423	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
424	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
425	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
426	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	11	7,960,000
427	Kepala Seksi Lahan dan Irigasi	8	4,920,000
428	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	8	4,920,000
429	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi	8	4,920,000
430	Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	7,960,000
431	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	9	4,920,000
432	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	9	4,920,000
433	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	8	4,920,000
434	Kepala Bidang Hortikultura	11	7,960,000
435	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura	8	4,920,000
436	Kepala Seksi Produksi Hortikultura	8	4,920,000
437	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	9	4,920,000
438	Kepala Bidang Perkebunan	11	7,960,000
439	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan	8	4,920,000
440	Kepala Seksi Produksi Perkebunan	8	4,920,000
441	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	9	4,920,000
442	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	7,960,000
443	Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi	8	4,920,000
444	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	8	4,920,000
445	Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9	4,920,000
446	Kepala Bidang Penyuluhan	11	7,960,000
447	Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	8	4,920,000
448	Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	9	4,920,000
449	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian	9	4,920,000
450	Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	9	4,570,000
451	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	8	3,880,000
452	Kepala UPTD Pembenhinan Tanaman Pangan, Hortikultura	9	4,570,000
453	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembenhinan Tanaman Pangan, Hortikultura	8	3,880,000
454	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah I	9	4,570,000
455	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah I	8	3,880,000
456	Kepala UPTD PUSKESWAN Wilayah II	9	4,570,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
457	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESWAN Wilayah II	8	3,880,000
458	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	8	4,570,000
459	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah I	8	3,880,000
460	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	8	4,570,000
461	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah II	8	3,880,000
462	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	8	4,570,000
463	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah III	8	3,880,000
464	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	8	4,570,000
465	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah IV	8	3,880,000
466	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	8	4,570,000
467	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah V	8	3,880,000
468	Kepala UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	8	4,570,000
469	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan dan Pemberdayaan Pertanian Wilayah VI	8	3,880,000
470	Kepala Dinas Perikanan	14	15,400,000
471	Sekretaris Dinas Perikanan	12	8,440,000
472	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,570,000
473	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,570,000
474	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Perikanan	11	7,420,000
475	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	8	4,570,000
476	Kepala Seksi Teknologi dan Informasi	8	4,570,000
477	Kepala Seksi Kelembagaan	8	4,570,000
478	Kepala Bidang Pengawasan Usaha Perikanan	11	7,420,000
479	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perikanan	8	4,570,000
480	Kepala Seksi Perijinan Usaha Perikanan	8	4,570,000
481	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	8	4,570,000
482	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	7,420,000
483	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Perikanan	8	4,570,000
484	Kepala Seksi Pakan dan Kesehatan Ikan	8	4,570,000
485	Kepala Seksi Perbenihan dan Budidaya	8	4,570,000
486	Kepala UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	8	4,570,000
487	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Ikan Lokal Singgamanik	8	3,880,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
488	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	15,720,000
489	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	8,620,000
490	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,660,000
491	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,660,000
492	Kepala Bidang Perindustrian	11	7,570,000
493	Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	9	4,660,000
494	Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka	9	4,660,000
495	Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi	9	4,660,000
496	Kepala Bidang Perdagangan	11	7,570,000
497	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	9	4,660,000
498	Kepala Seksi Sarana Pembinaan dan Pengawasan	9	4,660,000
499	Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi	8	4,660,000
500	Kepala Bidang Pasar	11	7,570,000
501	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9	4,660,000
502	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Pedagang	9	4,660,000
503	Kepala Seksi Pendaftaran , Pendaftaran dan Retribusi Pasar	9	4,660,000
504	Kepala UPTD Meterologi Legal	8	4,570,000
505	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Meterologi Legal	8	3,880,000
506	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14	16,370,000
507	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12	9,010,000
508	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	4,920,000
509	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	4,920,000
510	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,920,000
511	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi	11	7,960,000
512	Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata	9	4,920,000
513	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Pariwisata	9	4,920,000
514	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran	11	7,960,000
515	Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi	9	4,920,000
516	Kepala Seksi Festival dan Pameran	9	4,920,000
517	Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan	11	7,960,000
518	Kepala Seksi Sejarah dan Religi	9	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
519	Kepala Seksi Tradisi dan Seni Budaya	9	4,920,000
520	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan masyarakat	11	7,960,000
521	Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata	8	4,920,000
522	Kepala Seksi Pengembangan Potensi dan SDM Pariwisata	9	4,920,000
523	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14	17,420,000
524	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	9,610,000
525	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	5,290,000
526	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	5,290,000
527	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	5,290,000
528	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	11	8,530,000
529	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 1	9	5,290,000
530	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 2	9	5,290,000
531	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya 3	9	5,290,000
532	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	11	8,530,000
533	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1	9	5,290,000
534	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2	8	5,290,000
535	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3	8	5,290,000
536	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	11	8,530,000
537	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1	9	5,290,000
538	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2	9	5,290,000
539	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3	9	5,290,000
540	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	8,530,000
541	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 1	8	5,290,000
542	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 2	8	5,290,000
543	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 3	8	5,290,000
544	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14	18,020,000
545	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12	9,970,000
546	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	5,530,000
547	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	5,530,000
548	Kepala Bidang Anggaran	11	8,890,000
549	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	5,530,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
550	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	9	5,530,000
551	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Anggaran	8	5,530,000
552	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset	11	8,890,000
553	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	8	5,530,000
554	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan	8	5,530,000
555	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	8	5,530,000
556	Kepala Bidang Pendapatan	11	8,890,000
557	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah	8	5,530,000
558	Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan	8	5,530,000
559	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	8	5,530,000
560	Kepala Bidang Pendataan	11	8,890,000
561	Kepala Sub Bidang Pendataan	8	5,530,000
562	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan	8	5,530,000
563	Kepala Sub Bidang Pertimbangan Keberatan	9	5,530,000
564	Kepala Bidang PBB P2	11	8,890,000
565	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah I	8	5,530,000
566	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah II	8	5,530,000
567	Kepala Sub Bidang PBB-P2 Wilayah III	9	5,530,000
568	Kepala UPTD Pajak Daerah	9	6,491,707
569	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pajak Daerah	8	4,810,000
570	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	14	17,420,000
571	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	12	9,610,000
572	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	5,290,000
573	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	5,290,000
574	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara	11	8,530,000
575	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun	8	5,290,000
576	Kepala Sub Bidang Jabatan dan Pemindahan	9	5,290,000
577	Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Berkala	8	5,290,000
578	Kepala Bidang Pembinaan,Pendidikan dan Pelatihan	11	8,530,000
579	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	8	5,290,000
580	Kepala Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian	8	5,290,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
581	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin	8	5,290,000
582	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	16,960,000
583	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	9,360,000
584	Kepala Sub Bagian Umum	9	5,150,000
585	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	5,150,000
586	Kepala Sub Bagian Program	8	5,150,000
587	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	8,310,000
588	Kepala Seksi Pencegahan	9	5,150,000
589	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	9	5,150,000
590	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	11	8,310,000
591	Kepala Seksi Kedaruratan	9	5,150,000
592	Kepala Seksi Logistik	9	5,150,000
593	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	8,310,000
594	Kepala Seksi Rehabilitasi	9	5,150,000
595	Kepala Seksi Rekonstruksi	9	5,150,000
596	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	14	16,370,000
597	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	12	9,010,000
598	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,920,000
599	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	4,920,000
600	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11	7,960,000
601	Kepala Sub Bidang Kajian Strategis Daerah	8	4,920,000
602	Kepala Sub Bidang Idiologi, Kesatuan Bangsa dan HAM	8	4,920,000
603	Kepala Bidang Politik	11	7,960,000
604	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	8	4,920,000
605	Kepala Sub Bidang Demokratisasi	8	4,920,000
606	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	11	7,960,000
607	Kepala Sub Bidang Potensi dan Pelatihan	8	4,920,000
608	Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat	8	4,920,000
609	Kepala Bidang Perencanaan	11	7,960,000
610	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Pengendalian	8	4,920,000
611	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data, Pengolahan dan Pelaporan	8	4,920,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
612	Direktur Rumah Sakit Umum Kabanjahe	12	8,380,000
613	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Kabanjahe	11	7,360,000
614	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	4,530,000
615	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	4,530,000
616	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	8	4,530,000
617	Kepala Bidang Pelayanan Medik	11	7,360,000
618	Kepala Seksi Pelayanan dan Humas	8	4,530,000
619	Kepala Seksi Perawatan	8	4,530,000
620	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medik	11	7,360,000
621	Kepala Seksi Rekam Medik	8	4,530,000
622	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	8	4,530,000
623	Kepala Bidang Bina Program	11	7,360,000
624	Kepala Seksi Perencanaan	8	4,530,000
625	Kepala Seksi Diklat	8	4,530,000
626	Camat Barusjahe	12	8,550,000
627	Sekretaris Kecamatan Barusjahe	11	7,510,000
628	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,930,000
629	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,930,000
630	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,620,000
631	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,620,000
632	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,620,000
633	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4,620,000
634	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,620,000
635	Camat Berastagi	12	8,890,000
636	Sekretaris Kecamatan Berastagi	11	7,850,000
637	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
638	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
639	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
640	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,850,000
641	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	9	4,850,000
642	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	4,850,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
643	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
644	Lurah Gundaling I	9	4,850,000
645	Sekretaris Lurah Gundaling I	8	4,160,000
646	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling I	8	4,160,000
647	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling I	8	4,160,000
648	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling I	8	4,160,000
649	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling I	8	4,160,000
650	Lurah Gundaling II	9	4,850,000
651	Sekretaris Lurah Gundaling II	8	4,160,000
652	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gundaling II	8	4,160,000
653	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gundaling II	8	4,160,000
654	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gundaling II	8	4,160,000
655	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gundaling II	8	4,160,000
656	Lurah Tambak Lau Mulgab I	9	4,850,000
657	Sekretaris Lurah Tambak Lau Mulgab I	8	4,160,000
658	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgab I	8	4,160,000
659	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgab I	8	4,160,000
660	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgab I	8	4,160,000
661	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgab I	8	4,160,000
662	Lurah Tambak Lau Mulgab II	9	4,850,000
663	Sekretaris Lurah Tambak Lau Mulgab II	8	4,160,000
664	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tambak Lau Mulgab II	8	4,160,000
665	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgab II	8	4,160,000
666	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tambak Lau Mulgab II	8	4,160,000
667	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Tambak Lau Mulgab II	8	4,160,000
668	Camat Juhar	12	8,890,000
669	Sekretaris Kecamatan Juhar	11	7,850,000
670	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
671	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
672	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
673	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,850,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
674	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
675	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,850,000
676	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
677	Camat Kabanjahe	12	8,890,000
678	Sekretaris Camat Kabanjahe	11	7,850,000
679	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	8	4,160,000
680	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
681	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
682	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,850,000
683	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,850,000
684	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
685	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
686	Lurah Gung Leto	9	4,850,000
687	Sekretaris Lurah Gung Leto	8	4,160,000
688	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Gung Leto	8	4,160,000
689	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Gung Leto	8	4,160,000
690	Kepala Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Gung Leto	8	4,160,000
691	Kepala Seksi Umum kelurahan Gung Leto	8	4,160,000
692	Lurah Gung Negeri	9	4,850,000
693	Sekretaris Lurah Gung Negeri	8	4,160,000
694	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib kelurahan Gung Negeri	8	4,160,000
695	Kepala Seksi Kemasyarakatan kelurahan Gung Negeri	8	4,160,000
696	Kepala Kepala Seksi Pembangunan kelurahan Gung Negeri	8	4,160,000
697	Kepala Seksi Umum Kelurahan Gung Negeri	8	4,160,000
698	Lurah Kampung Dalam	9	4,850,000
699	Sekretaris Lurah Kampung Dalam	8	4,160,000
700	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Kampung Dalam	8	4,160,000
701	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Kampung Dalam	8	4,160,000
702	Kepala Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Kampung Dalam	8	4,160,000
703	Kepala Seksi Umum Kelurahan Kampung Dalam	8	4,160,000
704	Lurah Laucimba	9	4,850,000

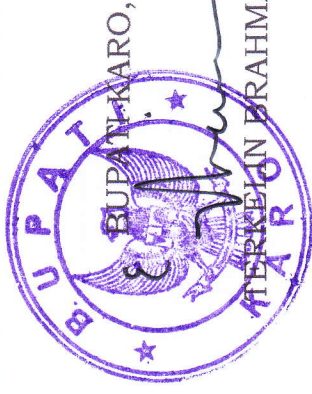
NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
705	Sekretaris Lurah Lau Cimba	8	4,160,000
706	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Lau Cimba	8	4,160,000
707	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Lau Cimba	8	4,160,000
708	Kepala Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Lau Cimba	8	4,160,000
709	Kepala Seksi Umum Kelurahan Lau Cimba	8	4,160,000
710	Lurah Padang Mas	9	4,850,000
711	Sekretaris Lurah Padang Mas	8	4,160,000
712	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Padang Mas	8	4,160,000
713	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Padang Mas	8	4,160,000
714	Kepala Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Padang Mas	8	4,160,000
715	Kepala Seksi Umum Kelurahan Padang Mas	8	4,160,000
716	Camat Kutubuluh	12	8,890,000
717	Sekretaris Kecamatan Kutubuluh	11	7,850,000
718	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
719	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
720	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
721	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,850,000
722	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
723	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,850,000
724	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
725	Camat Lau Baleng	12	8,890,000
726	Sekretaris Kecamatan Lau Baleng	11	7,850,000
727	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
728	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
729	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
730	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,850,000
731	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
732	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,850,000
733	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
734	Camat Mardingding	12	8,890,000
735	Sekretaris Kecamatan Mardingding	11	7,850,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
736	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
737	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
738	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
739	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,850,000
740	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
741	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	4,850,000
742	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
743	Camat Merdeka	12	8,320,000
744	Sekretaris Kecamatan Merdeka	11	7,310,000
745	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,820,000
746	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,820,000
747	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,500,000
748	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,500,000
749	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	9	4,500,000
750	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4,500,000
751	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	9	4,500,000
752	Camat Merek	12	8,550,000
753	Sekretaris Kecamatan Merek	11	7,510,000
754	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,930,000
755	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,930,000
756	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,620,000
757	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,620,000
758	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,620,000
759	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9	4,620,000
760	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,620,000
761	Camat Munte	12	8,550,000
762	Sekretaris Kecamatan Munte	11	7,510,000
763	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,930,000
764	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,930,000
765	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,620,000
766	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,620,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
767	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,620,000
768	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,620,000
769	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,620,000
770	Camat Namanteran	12	8,510,000
771	Sekretaris Kecamatan Namanteran	11	7,480,000
772	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,910,000
773	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,910,000
774	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,600,000
775	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,600,000
776	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,600,000
777	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,600,000
778	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,600,000
779	Camat Payung	12	8,320,000
780	Sekretaris Kecamatan Payung	11	7,310,000
781	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,820,000
782	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,820,000
783	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,500,000
784	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,500,000
785	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,500,000
786	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,500,000
787	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,500,000
788	Camat Simpang Empat	12	8,450,000
789	Sekretaris Kecamatan Simpang Empat	11	7,420,000
790	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,880,000
791	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,880,000
792	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,570,000
793	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,570,000
794	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	9	4,570,000
795	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	8	4,570,000
796	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,570,000
797	Camat Tiga Binanga	12	8,890,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
798	Sekretaris Kecamatan Tiga Binanga	11	7,850,000
799	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	4,160,000
800	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	4,160,000
801	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,850,000
802	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,850,000
803	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,850,000
804	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4,850,000
805	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,850,000
806	Lurah Tiga Binanga	9	4,850,000
807	Sekretaris Lurah Tiga Binanga	8	4,160,000
808	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kelurahan Tigabinanga	8	4,160,000
809	Kepala Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Tigabinanga	8	4,160,000
810	Kepala Seksi Pembangunan Kelurahan Tigabinanga	8	4,160,000
811	Kepala Seksi Umum Kelurahan Tigabinanga	8	4,160,000
812	Camat Tiganderket	12	8,510,000
813	Sekretaris Kecamatan Tiganderket	11	7,480,000
814	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,910,000
815	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,910,000
816	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,600,000
817	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8	4,600,000
818	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,600,000
819	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4,600,000
820	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	8	4,600,000
821	Camat Tigapanah	12	8,450,000
822	Sekretaris Kecamatan Tigapanah	11	7,420,000
823	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	3,880,000
824	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,880,000
825	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,570,000
826	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,570,000
827	Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	8	4,570,000
828	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	8	4,570,000

NO	JABATAN	KELAS	BESARAN TPP PERBULAN
829	Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayananan Umum	9	4,570,000
830	Camat Dolat Rayat	12	8,320,000
831	Sekretaris Kecamatan Dolat Royat	9	4,500,000
832	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	3,820,000
833	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	3,820,000
834	Kepala Seksi Pemerintahan	8	4,500,000
835	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9	4,500,000
836	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	4,500,000
837	Kepala Seksi Ketentramaan dan Ketertiban Umum	9	4,500,000

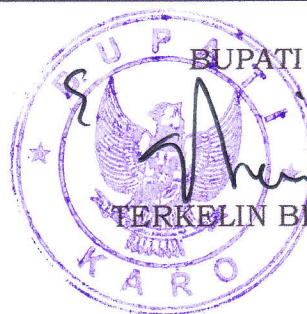


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BESARAN TPP PNS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	BESARAN TPP PERBULAN
I	PELAKSANA / CALON PELAKSANA	
1	Golongan IV	Rp 2,400,000
2	Golongan III	Rp 2,200,000
3	Golongan II	Rp 2,000,000
4	Golongan I	Rp 1,800,000
II	JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT	
5	Golongan IV	Rp 2,700,000
6	Golongan III	Rp 2,500,000
7	Golongan II	Rp 2,200,000
8	Golongan I	Rp 1,800,000
9	Auditor Penyelia	Rp 5,400,000
10	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp 5,200,000
11	Auditor Pelaksana	Rp 5,010,000
12	Auditor Ahli (Madya dan Utama)	Rp 10,250,000
13	Auditor Ahli (Muda)	Rp 9,690,000
14	Auditor Ahli (Pertama)	Rp 5,650,000
15	Pengawas Pemerintah Madya	Rp 10,250,000
16	Pengawas Pemerintah Muda	Rp 9,690,000
17	Pengawas Pemerintah Pertama	Rp 5,650,000
III	DINAS PERTANIAN	
18	Kordinator Penyuluh Pertanian	Rp 3,000,000
19	Penyuluh Pertanian	Rp 2,000,000
IV.a	RUMAH SAKIT UMUM	
20	Dokter Spesialis	Rp 4,100,000
21	Petugas Tenaga Radiasi	Rp 550,000
22	Petugas Laboratorium Klinik	Rp 550,000
23	Petugas Heamodialisa	Rp 550,000
IV.b	JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA	
24	Golongan IV	Rp 1,300,000
25	Golongan III	Rp 1,100,000
26	Golongan II	Rp 900,000
27	Golongan I	Rp 850,000
V	DINAS KESEHATAN	
V.a	PUSKESMAS DEKAT	
28	Kepala Puskesmas	Rp 4,000,000
29	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1,000,000
30	Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1,000,000
31	Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1,000,000
32	Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1,000,000
33	Dokter Umum	Rp 1,100,000
34	Dokter Gigi	Rp 1,100,000

NO	JABATAN	BESARAN TPP PERBULAN
35	Apoteker	Rp 1,100,000
36	Perawat	Rp 900,000
37	Bidan	Rp 900,000
38	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 900,000
39	Tenaga Non Kesehatan	Rp 700,000
V.b	PUSKESMAS SEDANG	
40	Kepala Puskesmas	Rp 4,300,000
41	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1,300,000
42	Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1,300,000
43	Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1,300,000
44	Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1,300,000
45	Dokter Umum	Rp 1,400,000
46	Dokter Gigi	Rp 1,400,000
47	Apoteker	Rp 1,400,000
48	Perawat	Rp 1,200,000
49	Bidan	Rp 1,200,000
50	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 1,200,000
51	Tenaga Non Kesehatan	Rp 1,000,000
V.c	PUSKESMAS JAUH	
52	Kepala Puskesmas	Rp 4,600,000
53	Pelaksana Tata Usaha	Rp 1,600,000
54	Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Rp 1,600,000
55	Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium	Rp 1,600,000
56	Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1,600,000
57	Dokter Umum	Rp 1,700,000
58	Dokter Gigi	Rp 1,700,000
59	Apoteker	Rp 1,700,000
60	Perawat	Rp 1,500,000
61	Bidan	Rp 1,500,000
62	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp 1,500,000
63	Tenaga Non Kesehatan	Rp 1,300,000
VI	DINAS PENDIDIKAN	
64	Koordinator Wilayah	Rp 3,100,000
65	Kepala SMP	Rp 700,000
66	Kepala SD/TK	Rp 500,000
67	Guru SD/TK	Rp 400,000
68	Guru SMP	Rp 400,000
69	Pengawas	Rp 600,000
70	Penilik	Rp 500,000
71	Pamong	Rp 500,000
VII	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	
72	Kuasa BUD	Rp 2,000,000



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHAMANA